

# PENGARUH STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE* DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP *AUDIT FEE*

ABDURRAHMAN MAULANA YUSUF

Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jl. Lingkar Selatan,  
Tamantirto, Kasihan, Bantul, D.I Yogyakarta, 55183, Telp +274 387656, Indonesia.

\*Corresponding Author , E-Mail address : [abdurrahmanmln59@gmail.com](mailto:abdurrahmanmln59@gmail.com)

## ABSTRACT

This research aims to examine the factors that influence of audit fee. The independent variable in this research is characteristics of corporate governance structure (independent commissioner, the size of board commissioner, the meeting proportion of board commissioner, size of audit committee and expertise of audit committee) and ownership structure (managerial ownership and institutional ownership).

The population of this research is manufacturing companies that listed in Indonesia Stock Exchange and Malaysia Stock Exchange. The selection of the sample of this research using purposive sampling method, that is the company who published the annual report. Based on purposive sampling method, the number of samples obtained are 42 sample Indonesian firms and 49 sample Malaysian firms. The analysis of this study uses multiple regression analysis using SPSS 23.0.

The results of this study indicate that the size of board commissioner has positive influence on audit fee and both of expertise of audit committee and institutional ownership has negative influence on audit fee in Indonesia. There are no influences on audit fee in Malaysia.

Keywords: independent commissioner, board commissioner, audit committee, ownership structure, audit fee.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *audit fee*. Variabel independen dalam penelitian ini adalah karakteristik struktur *corporate governance* (komisaris independen, jumlah dewan komisaris, proporsi rapat komisaris, jumlah komite audit dan keahlian komite audit) dan struktur kepemilikan (kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial).

Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Malaysia pada tahun 2014 dan 2015. Pemilihan sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu perusahaan yang menerbitkan *annual report*. Berdasarkan metode *purposive sampling*, jumlah sampel yang

didapat adalah 42 sampel untuk Indonesia dan 49 sampel untuk Malaysia. Analisis dari penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan program SPSS 23.0.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *audit fee* sedangkan keahlian komite audit dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *audit fee* di Indonesia. Sedangkan di Malaysia tidak ada variabel yang berpengaruh signifikan terhadap *audit fee*.

Kata kunci: komisaris independen, dewan komisaris, komite audit, struktur kepemilikan, *audit fee*

## PENDAHULUAN

Laporan keuangan yang mencerminkan kondisi dari entitas secara sistematis harus melakukan audit terhadap laporan keuangannya. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2009) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1, menjelaskan bahwa laporan keuangan yang ditampilkan oleh perusahaan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi supaya laporan keuangan yang disajikan memiliki hasil yang *relevant* dan *reliable* agar laporan keuangan dapat meyakinkan para pengguna laporan keuangan dan tidak terdapat salah saji material dalam penyusunannya.

Biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar jasa yang dilakukan auditor eksternal disebut dengan *audit fee*. *Audit fee* sendiri ditentukan melalui proses negosiasi antara pihak *stakeholders* dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang menaungi auditor tersebut dengan memperhatikan beberapa faktor (Immanuel & Yuyetta, 2014). SK No. KEP.024/IAPI/VII/2008 yang dikeluarkan oleh IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) pada tanggal 2 Juli 2008 mengenai Kebijakan Penentuan *Audit fee* pada lampiran 1 menjelaskan bahwa auditor dalam menjalankan praktik sebagai akuntan publik ketika menetapkan besaran imbalan harus secara wajar atas jasa audit yang diberikan.

Permasalahan yang terjadi adalah auditor eksternal mendapat *fee* dari perusahaan (*client*) yang telah diaudit dimana di satu sisi auditor harus mengedepankan independensinya dalam memberikan opini tetapi di sisi lain auditor memperoleh imbalannya dari perusahaan atas pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya, terdapat banyak pro kontra antara pihak yang mendukung adanya aturan mengenai *audit fee* dengan pihak yang menolak adanya aturan mengenai *audit fee* (Hazmi dan Sudarno, 2013).

Pelaksanaan *corporate governance* dapat mempengaruhi besarnya *audit fee*. Menurut Boediono (2005), dewan komisaris melalui pengawasnya dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga berpengaruh terhadap kandungan informasi laba didalamnya. Menurut Boo dan Sharman (2008) komisaris independen adalah pihak pengawas yang efektif karena tidak memiliki kepentingan finansial dalam perusahaan dan tidak memiliki hubungan psikologis dengan pihak manajemen, sehingga diharapkan dapat mengurangi perilaku oportunistik manajemen. Hal tersebut memicu komisaris independen meningkatkan permintaan terhadap audit eksternal sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada *shareholders* serta perlindungan terhadap reputasi pribadi, sehingga berdampak pada penentuan *audit fee*.

Menurut Esmaili *et al* (2014) Pemilik institusional mempunyai sebagian besar saham perusahaan. Peran para pemilik ini akan mengendalikan dan memantau perusahaan menjadi lebih menonjol dalam pengelolaannya. Kecenderungan kepemilikan institusional akan meningkatkan biaya audit karena dihubungkan kualitas audit karena investor lebih memilih perusahaan yang memiliki jasa audit yang berkualitas tinggi. Sedangkan kepemilikan manajerial yang tinggi memiliki kecenderungan untuk meminta cakupan audit yang tinggi sehingga memberikan nilai positif terhadap laporan keuangan. Perusahaan juga akan semakin termotivasi untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik jika menggunakan jasa audit yang mempunyai biaya jasa lebih tinggi (Oktorino dan Wedari, 2015).

Berpijak penelitian sebelumnya, dan mengkombinasikan model penelitian Hazmi dan Sudarno (2013), Oktorina dan Wedari (2015), Chintya (2015), Esmaili *et al* (2014) dan Khotimah (2014), maka penelitian ini mencoba untuk mengkombinasikan permasalahan lalu membandingkan pengaruh dari struktur *corporate governance* dan struktur kepemilikan terhadap penentuan *audit fee* di 2 negara di Asia Tenggara, yaitu Indonesia dan Malaysia.

## **TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

### **TEORI AGENSI**

Teori Agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori agensi menjelaskan adanya hubungan keagenan atau kontrak kerja yang melibatkan antara dua pihak. Menurut Rizqiasih (2010), teori keagenan ditekankan untuk mengatasi masalah yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan yang timbul saat keinginan kedua pihak berlawanan, serta cukup sulit bagi prinsipal untuk melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh agen. Masalah tersebut dapat memicu adanya konflik kepentingan antara pemilik dan manajer. Pihak dari luar perusahaan yang independen yaitu auditor eksternal dibutuhkan sebagai pemantau dan pemeriksanya.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh auditor sebagai pihak independen tersebut memerlukan biaya dalam bentuk biaya audit, sehingga akan memengaruhi penentuan *audit fee* yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dalam rangka untuk meningkatkan *assurance* pada laporan keuangan, maka sangat dibutuhkan pengujian laporan keuangan oleh auditor eksternal yang independen atas kedua belah pihak.

### **Keberadaan Komisaris Independen dan *Audit fee***

Menurut Beasley (1996), Dewan komisaris yang independen akan melakukan pengawasan yang lebih unggul sehingga reliabilitas dan validitas pelaporan keuangan yang lebih baik dapat dicapai. Hal ini akan mengurangi penaksiran risiko yang dilakukan oleh auditor yang mengarah kepada *audit fee* yang lebih rendah.

Hazmi (2013) menemukan hubungan negatif antara keberadaan komisaris independen terhadap *audit fee*. Dewan komisaris memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan. Mereka juga harus menilai kualitas tata kelola organisasi dan memastikan bahwa organisasi memiliki, sebagai contoh, praktik akuntansi yang efektif, pengendalian internal dan manajemen risiko, dan fungsi audit (Yatim *et al*, 2006). Dapat disimpulkan bahwa semakin dewan komisaris itu independen, maka *audit fee* semakin rendah. Sehingga hipotesis pertama yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

**H<sub>1a</sub> : Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *audit fee* di Indonesia.**

**H<sub>1b</sub> : Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *audit fee* di Malaysia.**

### **Ukuran Dewan Komisaris dan *Audit fee***

Total dewan komisaris yang semakin tinggi akan memengaruhi kemungkinan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan secara signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian Jensen dalam Hazmi dan Sudarno (2013) yang berpendapat bahwa mengorganisasi dan mengkoordinasi dewan komisaris yang berjumlah banyak akan mengalami kesulitan.

Hazmi dan Sudarno (2013) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki dewan komisaris yang besar akan berdampak pada adanya tuntutan akan pengendalian internal yang tinggi dan dituntut untuk mempunyai kualitas audit yang tinggi dari auditor eksternal, sehingga menyebabkan *fee* yang besar pula. Berdasarkan argumentasi tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa hipotesis kedua adalah sebagai berikut :

**H<sub>2a</sub>: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *audit fee* di Indonesia.**

**H<sub>2b</sub> : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *audit fee* di Malaysia.**

### **Intensitas Rapat Dewan Komisaris**

Conger *et al.* dalam Yatim *et al.* (2006) menyatakan bahwa peningkatan efektivitas dewan komisaris dapat diukur dengan jumlah rapat yang dilakukan selama tahun keuangan. Lipton *et al.* dalam Yatim *et al.* (2006) berpendapat bahwa pemegang saham akan mendapatkan manfaat apabila intensitas rapat dewan komisaris dilaksanakan dengan frekuensi yang tinggi.

Hazmi dan Sudarno (2013) tidak menemukan hubungan yang signifikan antara intensitas rapat dewan komisaris dan *audit fee* karena jumlah rapat yang dilakukan dewan komisaris cenderung rendah hanya sekitar 5 kali dalam setahun dan tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit sehingga tidak memengaruhi *audit fee*.

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan tingginya intensitas rapat yang dilakukan dewan komisaris, maka *audit fee* yang dibayarkan akan menjadi rendah. Hal ini karena proporsi rapat yang tinggi akan meningkatkan ketekunan dewan komisaris, efektivitas dewan komisaris dan manfaat dengan para pemegang saham sehingga meningkatkan pengawasan laporan keuangan yang akan mengurangi tanggung jawab auditor, sehingga hipotesis ketiga adalah sebagai berikut :

**H<sub>3a</sub>: Proporsi rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *audit fee* di Indonesia**

**H<sub>3b</sub> : Proporsi rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *audit fee* di Malaysia**

#### **Jumlah Komite Audit dan *Audit fee***

Bursa Malaysia mengamanatkan bahwa jumlah komite audit suatu perusahaan setidaknya terdiri dari 3 orang dan minimal ada 1 orang anggota komite audit yang harus merupakan anggota dari *Malaysian Institution of Accountants* (MIA) Yatim *et al.* (2006).

*The Blue Ribbon Company* (1999) menemukan hubungan negatif antara jumlah komite audit dengan *audit fee*. Jumlah komite audit yang lebih besar akan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Dengan kualitas pelaporan keuangan yang baik diharapkan mampu mengurangi beban pekerjaan yang harus dilakukan oleh auditor eksternal dan berakibat pada rendahnya *audit fee*. Berdasarkan argumentasi tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa hipotesis keempat adalah sebagai berikut :

**H<sub>4a</sub> : Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit fee* di Indonesia**

**H<sub>4b</sub> : Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit fee* di Malaysia**

#### **Keahlian Komite Audit dan *Audit fee***

Bukti empiris dan praktik tata kelola terbaik membuktikan bahwa keahlian komite audit dapat mengurangi resiko yang akan terjadi terkait dengan proses pembuatan laporan keuangan dan mengakibatkan rendahnya *audit fee* yang dikeluarkan oleh perusahaan (Yatim *et al.* 2006). Peningkatan efektivitas dari komite audit akan signifikan apabila anggota komite audit memiliki keahlian akuntansi dan keuangan

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit fee*. Sehingga hipotesis kelima yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

**H<sub>5a</sub> : Keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit fee* di Indonesia**

**H<sub>5b</sub> : Keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit fee* di Malaysia**

### **Kepemilikan Institusional dan *Audit fee***

Kepemilikan institusional didapat dari jumlah total saham dibagi dengan total jumlah saham perusahaan yang beredar. Pemisahan para pemilik saham ini dari manajemen perusahaan menyebabkan peran penting dari pemilik ini untuk mengendalikan dan memantau pengelolaan perusahaan menjadi lebih menonjol.

Semakin tinggi kepemilikan saham *shareholders* terhadap perusahaan tersebut, maka *shareholders* akan cenderung untuk lebih memperhatikan aktivitas perusahaan. Hal ini memotivasi perusahaan untuk menghasilkan kualitas audit yang tinggi sehingga menyebabkan tingginya biaya audit yang dikeluarkan perusahaan (Kane dan Velury, 2004). Hal ini juga mendukung penelitian Khotimah (2013) yang menjelaskan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *audit fee*. Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *audit fee*. Sehingga hipotesis keenam yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

**H<sub>6a</sub>: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *audit fee* di Indonesia**

**H<sub>6b</sub>: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *audit fee* di Malaysia**

### **Kepemilikan Manajerial dan *Audit Fee***

Kepemilikan manajerial merupakan faktor yang sangat penting untuk mengurangi konflik keagenan (Jensen and Meckling, 1976). Oktorina & Wedari (2015) menemukan pengaruh positif signifikan antara kepemilikan manajerial dengan *audit fee* dimana semakin tinggi kepemilikan manajerial perusahaan maka akan semakin tinggi *audit fee* yang dibayarkan untuk perusahaan yang mempunyai kepemilikan manajerial yang tinggi, manajer cenderung untuk meminta cakupan audit yang luas serta berkualitas tinggi dan

memberikan sinyal positif pada tuntutan membuat laporan keuangan yang lebih valid. Hal ini menyebabkan biaya yang dibayarkan kepada auditor independen semakin tinggi.

Oleh karena itu berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa tipe kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *audit fee*. Sehingga hipotesis ketujuh yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

**H<sub>7a</sub>: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *audit fee* di Indonesia**

**H<sub>7b</sub>: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *audit fee* di Malaysia.**

### ***Audit Fee* di Indonesia dan Malaysia**

Studi komparatif antar negara mengenai *audit fee* telah dilakukan oleh beberapa peneliti Younas et al (2014) dan Chintya (2015). Younas et al (2014) meneliti analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *audit fee* di Pakistan dan Cina ditemukan bahwa terdapat perbedaan faktor-faktor dalam penentuan *fee*. Kompleksitas bisnis dan risiko perusahaan sangat menentukan besarnya *audit fee* di Pakistan sedangkan jenis KAP sangat menentukan *audit fee* di Cina.

Chintya (2015) meneliti *audit fee* di Indonesia dan Malaysia selama pengadopsian IFRS. Indonesia dan Malaysia memiliki nilai *audit fee* yang berbeda karena data yang *disclose* di Indonesia berupa *professional fee* sudah tercampur dengan biaya-biaya konsultasi yang lain sedangkan di Malaysia berupa *audit remuneration* yang mencerminkan nilai audit yang sebenarnya. Tingkat pengungkapan *audit fee* yang sebenarnya di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Malaysia

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikembangkan hipotesis kedelapan sebagai berikut:

**H<sub>8a</sub>: Terdapat perbedaan penentuan nilai *audit fee* di Indonesia dan Malaysia.**

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Dan Sumber Data**

Obyek penelitian atau populasi penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Bursa Efek Malaysia (BEM) pada tahun 2014-



2015. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini secara *non probability sampling* dan melalui metode *purposive sampling*.

Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Malaysia pada tahun 2014 dan 2015.
2. Perusahaan yang mempunyai data lengkap terkait dengan variabel yang diteliti.
3. Laporan tahunan dipublikasikan secara lengkap oleh perusahaan.

## **Definisi Operasional Variabel Penelitian**

### **1. Variabel Dependen : *Audit fee***

Variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan *audit fee*. Halim (2005) menyatakan *fee* audit merupakan pendapatan yang diperoleh auditor dengan besar bervariasi tergantung pada beberapa faktor dalam penugasan audit, seperti: ukuran perusahaan klien, kompleksitas jasa audit yang dihadapi auditor, risiko audit yang dihadapi auditor dari klien, serta nama KAP yang melakukan jasa audit. Hazmi dan Sudarno (2013) menggunakan *logaritma natural professional fee* untuk pengukuran *audit fee*.. Variabel ini disimbolkan dengan LNFEED.

### **2. Variabel Independen**

#### **a. Keberadaan Komisaris Independen**

Variabel ini menunjukkan berapa prosentasi keberadaan komisaris independen pada perusahaan. Keberadaan komisaris independen (*BoardInd*) dapat dilihat pada laporan keuangan yang dikeluarkan perusahaan dengan rumus sebagai berikut :

$$BoardInd = \frac{Total\ Komisaris\ Independen}{Total\ Dewan\ Komisaris} \times 100\%$$

#### **b. Ukuran Dewan Komsaris**

Variabel Ukuran Dewan Komisaris diproksikan dengan total jumlah dewan komisaris yang berada pada suatu perusahaan. Mengacu pada penelitian yang

digunakan oleh Hazmi dan Sudarno (2013), maka ukuran dewan komisaris diukur menggunakan jumlah total dewan komisaris dalam perusahaan atau *BoardSize*. Rumus yang digunakan adalah :

$$BoardSize = Total\ Dewan\ Komisaris\ Perusahaan$$

**c. Proporsi Rapat Dewan Komisaris**

Variabel ini menunjukkan seberapa sering rapat dewan komisaris digunakan. Proksi yang digunakan proporsi rapat dewan komisaris adalah total rapat yang dilakukan dewan komisaris selama periode akuntansi atau *BoardMeet*. Adapun rumus *BoardMeet* sebagai berikut :

$$BoardMeet = Proporsi\ Rapat\ Dewan\ Komisaris$$

**d. Ukuran Komite Audit**

Ukuran komite audit perusahaan menunjukkan berapa jumlah anggota komite audit yang terdapat pada perusahaan. Ada pun lambang yang digunakan *ACSize* dengan rumus sebagai berikut :

$$ACSize = Total\ Anggota\ Komite\ Audit$$

**e. Keahlian Komite Audit**

Keahlian komite audit menggunakan prosentasi jumlah anggota komite audit yang ahli dalam bidang akuntansi dan keuangan terhadap total anggota komite audit. Proksi ini menggunakan rumus *ACExpert* sebagai berikut :

$$ACExpert = \frac{Total\ Anggota\ Komite\ Audit\ yang\ Memiliki\ Keahlian\ Akuntansi\ dan\ Keuangan}{Total\ Anggota\ Komite\ Audit} \times 100\%$$

**f. Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional menunjukkan total kepemilikan saham yang dimiliki perusahaan dengan rumus sebagai berikut :

$$IO = \frac{Total\ Kepemilikan\ Saham\ Institusional}{Total\ Seluruh\ Saham\ Beredar}$$

**g. Kepemilikan Manajerial**

Variabel Manajerial menggunakan total kepemilikan manajer terhadap seluruh saham beredar dengan rumus MO sebagai berikut :

$$MO = \frac{\text{Total Kepemilikan Manajerial}}{\text{Total Seluruh Saham Beredar}}$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Objek Penelitian

Berdasarkan metode *purposive sampling* diperoleh 42 perusahaan manufaktur di Indonesia dan 49 perusahaan manufaktur di Malaysia yang memenuhi kriteria.

### Uji Statistik Deskriptif

*Audit fee* di Indonesia mempunyai nilai minimal sebesar Rp199.900.000,00 oleh PT. Betonjaya Manunggal Tbk, nilai maksimal sebesar Rp12.352.000.000,00 oleh PT. Gajahtunggal Tbk, rata-rata sebesar Rp2.752.919.259,00 dengan nilai standar deviasi 3.128.119.185,07. Sedangkan Malaysia mempunyai nilai minimal sebesar Rp201.909.000,00 oleh Muda Holdings Berhad, nilai maksimal Rp853.860.000,00 oleh SKP Resources Berhad, rata-rata sebesar Rp487.795.376,00 dengan nilai standar deviasi 172.272.033,099.

Variabel proporsi komisaris independen di Indonesia mempunyai nilai minimal sebesar 33%, maksimal 66%, rata-rata sebesar 39,8% dengan nilai standar deviasi 0,08486. Sedangkan Malaysia mempunyai nilai minimal sebesar 33%, maksimal 60%, rata-rata sebesar 44,06% dengan nilai standar deviasi 0,07785.

Variabel jumlah dewan komisaris di Indonesia mempunyai nilai minimal sebesar 2 dewan, maksimal 6 dewan, rata-rata sebesar 4 dewan dengan nilai standar deviasi 1,20876. Sedangkan Malaysia mempunyai nilai minimal sebesar 5 dewan, maksimal 8 dewan, rata-rata sebesar 7 dewan dengan nilai standar deviasi 0,91752.

Variabel proporsi rapat komisaris di Indonesia mempunyai nilai minimal sebesar 70%, maksimal 100%, rata-rata sebesar 95,4% dengan nilai standar deviasi 0,07708. Nilai rata-rata menunjukkan angka mendekati nilai maksimum. Sedangkan Malaysia mempunyai nilai minimal sebesar 86%, maksimal 100%, rata-rata sebesar 95,51% dengan nilai standar deviasi 0,04016.

Variabel jumlah komite audit di Indonesia mempunyai nilai minimal sebesar 2 orang, maksimal 3 orang, rata-rata sebesar 3 orang dengan nilai standar deviasi 0,15430.

Sedangkan Malaysia mempunyai nilai minimal sebesar 3 orang, maksimal 4 orang, rata-rata sebesar 3 orang dengan nilai standar deviasi 0,33120.

Variabel keahlian komite audit di Indonesia mempunyai nilai minimal 66%, maksimal 100%, rata-rata sebesar 85,43% dengan nilai standar deviasi 0,17030. Sedangkan Malaysia mempunyai nilai minimal sebesar 33%, maksimal 100%, rata-rata sebesar 62,53% dengan nilai standar deviasi 0,24919.

Variabel kepemilikan institusional di Indonesia mempunyai nilai minimal 43,60%, maksimal 90,59%, rata-rata sebesar 67,76% dengan nilai standar deviasi 0,1252549. Sedangkan Malaysia mempunyai nilai minimal sebesar 40,85%, maksimal 78,93%, rata-rata sebesar 60,63% dengan nilai standar deviasi 0,1079345.

Variabel kepemilikan institusional di Indonesia mempunyai nilai minimal 0,13%, maksimal 28,88%, rata-rata sebesar 8,61% dengan nilai standar deviasi 0,0841743. Sedangkan Malaysia mempunyai nilai minimal sebesar 0,87%, maksimal 11,83%, rata-rata sebesar 4,82% dengan nilai standar deviasi 0,0294977.

### **Asumsi Klasik**

Sebelum dilakukan analisis hasil pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yaitu pengujian normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji normalitas, data Indonesia dan Malaysia menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200 sehingga data berdistribusi normal. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa data tidak mengandung multikolinearitas yang ditunjukkan dengan nilai *variance inflation factor* (VIF) di bawah nilai 10. Begitu pula hasil pengujian tidak terdapat autokorelasi dan heteroskedastisitas di Indonesia dan Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa data dapat digunakan untuk pengujian hipotesis (Ghozali, 2006).

### **Hasil Penelitian**

#### **Model Regresi Berganda**

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda diperoleh hasil seperti yang tampak pada Tabel 1 dan Tabel 2.

**Tabel 1. Ringkasan Uji *t* (Indonesia)**

Model	Hubungan	$\beta$	<i>Beta</i>	<i>Sig</i>
		<i>Unstandardized Coefficients</i>	<i>Standardized Coefficients</i>	
	(Constant)	20.670		.000
1.	BoardInd	.539	.034	.777
2.	BoardSize	.743	.672	.000
3.	BoardMeet	4.254	.245	.071
4.	ACSize	-.554	-.064	.586
5.	ACExpert	-2.728	-.347	.004
6.	IO	-3.519	-.330	.014
7.	MO	-2.928	-.184	.155

Dari Tabel 1 dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{LN\_FEE} = 20.670 + 0,539(\text{BoardInd}) + 0,743(\text{BoardSize}) + 4,254(\text{BoardMeet}) - 554(\text{ACSize}) - 2728(\text{ACExperts}) - 3,519(\text{IO}) - 2,928(\text{MO}) + e$$

**Tabel 2. Ringkasan Uji *t* (Malaysia)**

Model	Hubungan	$\beta$	<i>Beta</i>	<i>Sig</i>
		<i>Unstandardized Coefficients</i>	<i>Standardized Coefficients</i>	
	(Constant)	18.686		.000
1.	BoardInd	-.050	-.011	.948
2.	BoardSize	.014	.035	.829
3.	BoardMeet	1.669	.187	.271
4.	ACSize	-.238	-.221	.191
5.	ACExpert	.174	.122	.493
6.	IO	.201	.061	.752
7.	MO	2.202	.182	.328

Dari Tabel 2 dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{LN\_FEE} = 18.686 - 0,50(\text{BoardInd}) + 0,14(\text{BoardSize}) + 1,669(\text{BoardMeet}) - 0,238(\text{ACSize}) + 0,174 (\text{ACExperts}) + 0.201(\text{IO}) + 2,202(\text{MO}) + e$$

Hasil pengujian hipotesis pertama di Indonesia menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh yang negatif antara proporsi komisaris independen terhadap *audit fee*. Hal ini dikarenakan bahwa jumlah komisaris independen rata-rata hanya sekitar 39,8 persen dari total dewan komisaris sehingga kalah suara dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh dengan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam rapat dewan komisaris, pendapat komisaris independen tidak terlalu efektif dan keputusan yang diambil tidak terlalu efektif pula terhadap validitas laporan keuangan. Dengan demikian penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Hazmi dan Sudarno (2013) dan tidak mendukung penelitian yang dilakukan Beasley (1996) yang menyatakan bahwa komisaris independen dapat mengurangi penaksiran risiko auditor eksternal sehingga akan mengurangi *audit fee*.

Hasil pengujian hipotesis pertama di Malaysia menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh yang negatif antara proporsi komisaris independen terhadap *audit fee*. Hal ini juga dikarenakan bahwa jumlah komisaris independen rata-rata hanya sekitar 44 persen dari total dewan komisaris sehingga kalah suara dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan *good corporate governance*. Dalam rapat dewan komisaris, pendapat komisaris independen tidak terlalu efektif dan keputusan yang diambil tidak terlalu berpengaruh terhadap validitas laporan keuangan. Dengan demikian penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Hazmi dan Sudarno (2013) bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *audit fee* dan tidak mendukung penelitian yang dilakukan Beasley (1996) yang menyatakan bahwa komisaris independen dapat mengurangi tanggung jawab auditor eksternal sehingga akan mengurangi *audit fee*.

Hasil pengujian hipotesis kedua di Indonesia menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif antara ukuran dewan komisaris terhadap *audit fee*. Hal ini mendukung penelitian dari Hazmi dan Sudarno (2013) di Indonesia bahwa ukuran dewan komisaris yang semakin besar dianggap kurang efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas sehingga mengarah kepada *audit fee* yang lebih tinggi.

Hasil pengujian hipotesis kedua di Malaysia menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh yang positif antara ukuran dewan komisaris terhadap *audit fee*. Hasil ini mendukung penelitian Yatim et al (2006) dan Rizqiasih (2010) bahwa tidak ada pengaruh

dewan komisaris terhadap audit fee. Pada dasarnya, pemilihan anggota dewan komisaris berdasarkan kedudukan dan kekerabatan menyebabkan *check and balance* tidak berjalan sepatutnya

Hasil pengujian hipotesis ketiga di Indonesia menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh yang negatif antara proporsi rapat dewan komisaris terhadap *audit fee*. Walaupun frekuensi rapat rata-rata mencapai 95,8%, hal ini tidak memiliki pengaruh signifikan karena menurut penelitian Hazmi dan Sudarno (2013) jumlah rapat rata-rata hanya terjadi 5 kali setahun.

Hasil pengujian hipotesis ketiga di Malaysia menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh yang negatif antara intensitas rapat dewan komisaris terhadap *audit fee*. Hal ini karena rapat yang dilakukan dewan komisaris tidak berpengaruh dan tidak memberikan kontribusi terhadap kualitas audit sehingga tidak berpengaruh terhadap penetapan *audit fee*. Penelitian ini mendukung penelitian Hazmi dan Sudarno (2013 dan Rizqiasih (2010). Namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Carcello et al (2002) yang mengatakan bahwa perusahaan yang *diligent* (rajin meghadiri rapat) dapat meningkatkan *audit fee external*.

Hasil pengujian hipotesis keempat di Indonesia menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh yang negatif antara ukuran komite audit terhadap *audit fee*, Sehingga hipotesis 4<sub>a</sub> ditolak. Regulasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM SE-03/PM/2000 tanggal 5 Mei 2000 serta peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Jakarta melalui peraturan KEP-339/BEJ/07-2001 mengharuskan seluruh perusahaan yang telah terdaftar di bursa efek harus memiliki komite audit. Oleh karena itu, tidak ada pengaruhnya lagi setelah diberlakukannya kewajiban tersebut.

Hasil pengujian hipotesis keempat di Malaysia menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh yang negatif antara ukuran komite audit terhadap *audit fee*, sehingga hipotesis 4<sub>b</sub> ditolak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hazmi dan Sudarno (2013), Rizqiasih (2010) dan Hay et al (2008). Penelitian ini bertentangan dengan *The Blue Ribbon Committee* (1999) yang meekomendasikan bahwa dengan anggota komite audit yang lebih banyak maka akan semakin meningkatkan pengawasan dalam proses pelaporan keuangan sehingga mengurangi pengujian substantif auditor dan mengurangi fee yang dibayarkan.

Hasil pengujian hipotesis kelima di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang negatif antara keahlian komite audit terhadap *audit fee*. Pendidikan akuntansi dan keuangan yang diajarkan saat dibangku kuliah membantu dalam pengaplikasian ilmu dilapangan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Hazmi dan Sudarno (2013), namun sesuai dengan penelitian yang dilakukan Abbot *et al.* (2003) bahwa komite audit yang telah melalui pendidikan akuntansi dan keuangan akan melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan yang lebih baik agar dapat melindungi reputasi komite audit. Oleh karena itu, hal ini akan mengarah kepada berkurangnya risiko pengendalian sehingga pengujian substantif dapat dikurangi serta diharapkan dapat memperkecil *audit fee*.

Hasil pengujian hipotesis kelima di Malaysia menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh yang negatif antara keahlian komite audit terhadap *audit fee*. Hal ini dikarenakan permasalahan yang terjadi dalam pelaporan keuangan tidak selamanya diatasi oleh komite audit yang ahli. Teori dan permasalahan di lapangan tentu akan berbeda. Hal ini sejalan dengan penelitian Hazmi dan Sudarno (2013) dan Abbot *et al.* (2003).

Hasil pengujian hipotesis keenam di Indonesia menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh yang positif antara kepemilikan institusional terhadap *audit fee*. Namun menurut pengujian statistik menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit fee*. Kepemilikan institusional yang semakin tinggi berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan dan mempunyai hak *voting* yang tinggi dalam menentukan keputusan strategik perusahaan. Hal ini akan mendorong perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik, Oleh karena itu, laporan keuangan yang lebih berkualitas dapat mengurangi risiko dan pengujian substantif auditor dan menghasilkan *audit fee* yang lebih rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mitra *et al* (2007). Penelitian ini bertolak belakang dengan Wedari (2015) dan Azadi dan Mohammadi (2014) yang tidak menemukan hasil signifikan antara kepemilikan institusional dan *audit fee*.

Hasil pengujian hipotesis keenam di Malaysia menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh yang positif antara kepemilikan institusional audit terhadap *audit fee*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh dengan Wedari (2015) dan Azadi dan



Mohammadi (2014) bahwa tidak ada pengaruh kepemilikan institusioanal terhadap *audit fee*.

Hasil pengujian hipotesis ketujuh di Indonesia menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh yang positif antara kepemilikan manajerial terhadap *audit fee*. Hal ini dikarenakan kepemilikan manajerial di Indonesia menurut statistik hanya sekitar 9,9 % sehingga tidak berpengaruh dalam besarnya *audit fee* yang ditentukan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktorino dan Wedari (2010) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif. Hal ini dikarenakan semakin tinggi kepemilikan manajerial perusahaan, maka untuk menjaga reputasi manajemen, manajemen akan lebih termotivasi untuk membuat laporan keuangan yang lebih berkualitas dan membayar *fee* lebih tinggi kepada auditor external agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi.

Hasil pengujian hipotesis ketujuh di Malaysia menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh yang positif antara kepemilikan manajerial terhadap *audit fee*. Kepemilikan manajerial yang ter *disclose* pada laporan keuangan rata-rata hanya sekitar 4,8 % dari seluruh saham pada perusahaan. Hal ini sangat sedikit sekali sehingga tidak memiliki pengaruh antara kepemilikan manajerial. Penelitian ini bertolak belakang terhadap Esmali et al (2014) yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kepemilikan manajerial dengan *audit fee*.

## **Uji Beda**

Jumlah perusahaan Indonesia adalah 42 perusahaan dan jumlah perusahaan Malaysia adalah 49 perusahaan. Rata-rata nilai *audit fee* di Indonesia adalah 21.014118 dan di Malaysia adalah 19.943680. Pada *test for equality of variances* bahwa nilai sig menunjukkan angka  $0,000 < (\alpha) 0,05$ . Oleh karena itu, pada sig. (2-tailed) digunakan kolom *equal variances not assumed*. Pada kolom tersebut menunjukkan angka  $0,000 < (\alpha) 0,05$ . Artinya terdapat perbedaan penentuan *audit fee* di Indonesia dan Malaysia, maka hipotesis diterima.

Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara penentuan nilai *audit fee* di Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, *audit fee* masih diprosikan sebagai *professional fee* sehingga tidak mencerminkan nilai *audit fee* yang sebenarnya karena telah tercampur oleh biaya-biaya konsultan yang lain. Hal ini dikarenakan *audit fee* masih dianggap sebagai pengungkapan sukarela oleh Indonesia. Berbeda dengan Malaysia yang menampilkan nilai audit yang sebenarnya yaitu menggunakan pengukuran *audit remuneration*. Hal ini walaupun *audit fee* merupakan *voluntary disclosure*, namun tingkat pengungkapannya jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian adalah proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *audit fee* di Indonesia maupun Malaysia. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *audit fee* di Indonesia, sedangkan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *audit fee* di Malaysia. Proporsi rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *audit fee* di Indonesia maupun Malaysia. Ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit fee* di Indonesia maupun Malaysia. Keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit fee* di Indonesia. Sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit fee* di Malaysia. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *audit fee* di Indonesia. Sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *audit fee* di Malaysia. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *audit fee* di Indonesia maupun Malaysia. Pada hasil uji beda, terdapat perbedaan dalam penentuan nilai *audit fee* di Indonesia dan Malaysia.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah jangka waktu periode pengamatan hanya dua tahun yaitu tahun 2014 dan 2015 sehingga sampel yang digunakan sangat terbatas. Jika dilihat dari nilai *adjusted R Square* sebesar 0,511 atau 51,1 % (Indonesia) dan -0,073 atau -7,3% (Malaysia), berarti masih ada variabel-variabel lain yang dapat diteliti lebih lanjut yang diduga berpengaruh terhadap *audit fee*. *Adjusted R Square* Malaysia mendapatkan

hasil negatif diduga karena sample yang terlalu sedikit dan jumlah variabel yang cukup banyak yaitu 7 variabel.

Keterbatasan lainnya adalah banyak perusahaan Indonesia yang tidak mengungkapkan *professional fees* dan kepemilikan manajerial, sehingga mengurangi banyak sampel. Karena keterbatasan data tentang *audit fee*, maka dalam penelitian ini Indonesia diterapkan penggunaan data *professional fees* untuk memberikan nilai pada variabel *audit fee*. Berbeda dengan negara Malaysia yang menggunakan akun *audit remuneration* yang menjelaskan data *audit fee* yang sebenarnya.

Selanjutnya, diharapkan penelitian tidak hanya menggunakan perusahaan manufaktur, tetapi seluruh jenis perusahaan yang terdaftar di bursa efek. Penambahan variabel-variabel yang mempunyai pengaruh terhadap *audit fee* seperti manajemen laba, ukuran perusahaan, kompleksitas auditor, profitabilitas, audit internal, *leverage*, *audit firm size* dan koneksi politik juga sebaiknya digunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno (2012), *Auditing ; Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*, Edisi Keempat Buku 1, Jakarta, Salemba Empat.
- Azadi, Zahra Muhammad dan Mohammadi, Esfandyar (2014), "Investigating the relationship between institutional ownership and audit fees", *International Journal of Empirical Finance*, Vol. 2 No. 1, hal. 27-33.
- Beasley, M.S. (1996), "An empirical analysis of the relation between the boards of directors composition and financial statement fraud", *The Accounting Review Journal*, Vol. 71 No. 4, hal. 443-465.
- Blue Ribbon Committee (1999), "Report and recommendations on improving the effectiveness of corporate audit committees". *The New York Stock Exchange and the National Association of Securities Dealers Journal*, New York.
- Boo, Elfred and Sharma, Divesh (2008), "Effect of regulatory oversight on the association between internal governance characteristics and audit fees" *Journal of Accounting and Finance*, No. 48, hal. 51 -71.
- Boediono, Gideon SB. (2005), "Kualitas laba: Studi pengaruh mekanisme corporate governance dan dampak manajemen laba dengan menggunakan analisis jalur" *Simposium Nasional Akuntansi VII*, Solo.

- Carcello, J., Hermanson, D., Neal, T., and Riley, R. (2002), "Board characteristics and audit fees" *Contemporary Accounting Research*, Vol. 19 No. 3, hal. 365-384.
- Chintya, Yunita Deby (2015), "Analisis komparasi faktor-faktor yang mempengaruhi audit fees selama masa pengadopsian IFRS di indonesia dan malaysia", *Skripsi Akuntansi*, Universitas Sumatra Utara.
- Esmaeili, Mahmoud Reza, Mirgoushe, Najmeddin and Mortazavi, Nahid (2014), "The relationship between ownership structure and audit fee in companies listed in tehran stock exchange", *Reef Resources Assessment and Management Technical Paper*, Vol. 40 No. 1, hal. 463-469.
- Gati, Kharisma (2015), "Pengaruh komite audit dan tipe kepemilikan perusahaan pada audit fees" *Skripsi Akuntansi*, Universitas Diponegoro.
- Ghosh, Saibal (2010), "Firm ownership type, earnings management and auditor relationship : evidence from india" <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/30322/>. Diakses tanggal 30 Juli 2016 pk 07.00 WIB.
- Ghozali, Imam (2006), *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS cetakan IV*. Semarang, Universitas Diponegoro.
- Gul, F. A., Chen, C. J. P., and Tsui, J. S. L. (2003). "Discretionary accounting accruals, managers' incentives and audit fees" *Contemporary Accounting Research*, Vol. 20 No. 3, hal. 441-464
- Hamid, M.A., and Abdullah, Azizah (2012), "Influence of corporate governance on audit and non-audit fees: malaysian evidence" *Journal of Business and Policy Research*, Vol. 7 No. 3, September, hal. 140-158.
- Hay, David., Knechel, W. Robert and Ling, Helen (2008), "Evidence on the impact of internal control and corporate governance on audit fees" *International Journal of Auditing*, Vol. 12 No. 12, Maret, hal. 9-24.
- Halim, Yonathan (2005), "Peranan metode lowballing cost oleh kantor akuntan publik di surabaya." *Skripsi*, Universitas Kristen Petra Surabaya
- Hazmi, M.A., dan Sudarno (2013), "Pengaruh struktur governance dan internal audit terhadap fee audit eksternal pada perusahaan - perusahaan manufaktur yang listing di BEI", *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 2 No. 2, hal. 1.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (2009), *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

- Immanuel, Raymond dan Yuyetta, Etna N.A (2014), “Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi penetapan audit fees”, *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 2 No. 3, hal. 1-12.
- Institut Akuntan Publik Indonesia (2008). Surat Keputusan Ketua Umum IAPI SK KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang Kebijakan Penentuan Fee tanggal 2 Juli 2008, Jakarta.
- Jensen, M., and Meckling, W (1976). “Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure”, *Journal of Financial Economics*, Vol. 3 No. 3, hal. 305-60.
- Kayu, Nariya (2012), Teori Agensi, <http://bit.ly/2amMYps>, Diakses tanggal 01 Agustus 2016 pk 00.41 WIB.
- Kane, Gregory D., and Velury, Uma (2004), “The role of institutional ownership in the market for auditing services : an empirical investigation”, *Journal of Business Research*, Vol. 57 No. 9, September, hal. 976-983.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta.
- Mitra, Santanu., Hossain, M., and Deis, Donald R. (2007), “The empirical relationship between ownership characteristics and audit fees”. *Rev Quant Finance Accounting*, Vol 28, Januari, hal. 257–285.
- Nazaruddin, Ietje dan Basuki, Agus Tri (2015), *Analisis statistik dengan SPSS.*, Yogyakarta
- Nugrahani, N. Rizki., dan Sabeni, A. (2013), “Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan fee audit eksternal pada perusahaan yang terdaftar di BEI”, *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 2 No. 2, hal. 1-11.
- Oktorina, Megawati and Wedari, L. Kusumaning (2015) “An empirical investigation on ownership characteristics, activities of the committee, and audit fees, applied finance and accounting” Vol 1, No 1, Februari.
- Rizqiasih (2010), “Pengaruh struktur governance terhadap fee audit eksternal”, *Skripsi Akuntansi*, Universitas Diponegoro.
- Santoso, Eko Budi (2010), “Pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap kinerja”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 6 No. 2, Agustus, hal. 125-137.
- Simunic, D. (1984), “Auditing, consulting and auditor independence”, *Journal of Accounting Research*, Vol. 22, hal. 679-702.

- Santoso, Singgih (2010). *Statistik Multivariat*, Jakarta : PT Gramedia.
- Suharli, Michell., dan Nurlaelah (2008), “Konsentrasi auditor dan penetapan fee audit : investigasi pada BUMN” *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol. 12 No. 2, hal. 133-148.
- Sukirni, Dwi (2012), “Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan deviden dan kebijakan hutang analisis terhadap nilai perusahaan” *Accounting Analysis Journal*, Vol. 1 No. 1.
- Suryanto, Rudy, Audit Berbasis Resiko - Sesuai Dengan International Standards of Auditing, <http://bit.ly/2aBaELa/>, Diakses tanggal 30 Juli 2016 pk 12.00 WIB.
- Tuanakotta, Theodorus M. (2013), *Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Salemba Empat. Jakarta.
- Widiasari, Esti., dan Prabowo, T. J. Wahyu (2009), “Pengaruh pengendalian internal perusahaan dan struktur corporate governance terhadap fee audit”, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 9 No. 2, hal. 125-137.
- Wong, Shirley (2009), “Audit pricing in australia in 2000s” *International Review of Business Research Papers*, Vol. 5 No.3, Hal. 82-89.
- Yatim, Puan., Kent, Pamela and Peter, Clarkson (2006), “Governance structures, ethnicity, and audit fees of malaysian listed firms” *Bond University Journal*, Australia.
- Younas, Zahid Irshad., Velte, Patrick and Ashfaq, Khadija (2014), “Audit pricing in china and pakistan : a comparative riview of audit practices” *Accounting and Management Information Systems Journal*, Vol. 13, No. 1, hal. 98–110.